



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data hasil penelitian kuantitatif berbentuk angka yang dianggap mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini, kedalaman data atau analisis tidak menjadi persoalan yang utama, terpenting dari riset kuantitatif ini merupakan riset yang menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat ditarik menjadi kesimpulan (Kriyantono, 2009, h. 55).

Dalam penelitian kuantitatif, peneliti diharuskan untuk bersikap objektif. Penelitian ini memang menggunakan manusia untuk mendapatkan hasil, tetapi harus dibatasi sedemikian rupa sehingga subjektivitas tidak muncul. Artinya bahwa peneliti harus menghilangkan bias, keberpihakan, atau kecenderungan tertentu dari peneliti. Dengan itu, hasil dari penelitian ini adalah benar-benar mencerminkan isi dari suatu teks, dan bukan akibat dari subjektivitas dari peneliti (Eriyanto, 2011, h.16)

Riset kuantitatif memiliki beberapa ciri-ciri, hal tersebut membuat peneliti memilih penelitian kuantitatif. Ciri pertama adalah periset dan subjek risetnya memiliki hubungan yang jauh. Realitas harus terpisah di luar penulis agar alat ukur yang digunakan dapat terjaga tingkat objektivitasnya. Ciri kedua adalah penelitian bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis, peneliti dapat mendukung atau menolak teori. Selain itu, data hanya sebagai sarana konfirmasi teori, dengan

kata lain teori dibuktikan dengan data. Ciri ketiga adalah hasil riset harus dapat digeneralisasikan, penelitian ini menuntut sampel yang representative dari seluruh populasi, operasionalisasi konsep, serta alat ukur yang valid dan reliabel. Ciri yang terakhir adalah prosedur penelitian rasional empiris, konsep dan teori harus bisa membuktikan dengan data yang dikumpulkan (Kriyantono, 2009, h.56).

Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu deskriptif. Menurut Bungin (2013, h. 48) penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian yang diambil dari situasi kondisi atau fenomena realitas sosial dalam masyarakat dan menariknya menjadi gambaran suatu ciri, karakter, sifat, model, atau tanda dari situasi kondisi atau fenomena tertentu.

Selain itu, penelitian ini semata hanya untuk memperoleh deskripsi, bukan menguji hipotesis tertentu atau menguji hubungan variabel. Hasil penelitian yang didapatkan peneliti adalah menggambarkan objektivitas pemberitaan isu kasus korupsi e-KTP pada media *online* Detik dan Liputan6.

3.2 Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Secara umum analisis isi kuantitatif merupakan suatu teknik penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis karakter isi pesan komunikasi yang nyata melalui proses analisis dilakukan secara objektif, valid, variabel, dan dapat direplikasi (Eriyanto, 2011, h. 15).

Paradigma yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah paradigma positivistik. Paradigma positivistik adalah suatu keyakinan dasar yang berakar dari paham ontologi realisme, yang menyatakan bahwa realitas itu ada dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam (*natural laws*). Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut nyata berjalan (Salim, 2001, h. 39).

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek yang terdiri dari manusia, benda, gejala atau peristiwa yang terjadi sebagai sumber. Populasi digolongkan menjadi dua yaitu populasi dengan jumlah terbatas dan populasi dengan jumlah tidak terbatas. Populasi dengan jumlah terbatas merupakan populasi yang memiliki sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif. Sedangkan, populasi dengan jumlah tidak terbatas merupakan populasi yang memiliki sumber data yang tidak dapat ditentukan batasnya secara kuantitatif (Nawawi, 2000 dikutip dalam Taniredja, 2011, h. 33).

Mengidentifikasi populasi secara tepat dan akurat diperlukan sejak awal penarikan sampel. Jika populasi tidak teridentifikasi dengan baik maka kesimpulan yang dihasilkan dari suatu penelitian kemungkinan akan keliru (Hermawan, 2009, h. 145).

Dari jumlah berita yang peneliti dapatkan selama periode, peneliti memutuskan untuk menggunakan *total sampling*. Dengan menggunakan *total sampling*, maka hasil penelitian yang didapatkan akan lebih tepat dalam

pengukuran akurasi. Menurut Sugiyono (2013, h. 124), total sampling adalah teknik penentuan sampel dengan cara mengambil seluruh populasi sebagai sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh berita mengenai kasus korupsi e-KTP di media *online* Detik dan Liputan6 periode 9 Maret pada sidang pertama kasus korupsi e-KTP hingga 15 Maret 2017 kasus korupsi e-KTP masuk dalam kategori korupsi terbesar di Indonesia. Berita dalam rentang waktu tersebut berjumlah 253 artikel berita, di antaranya 147 berita *online* Detik dan 106 berita *online* Liputan6. Berikut adalah sampel artikel berita media *online* Detik mengenai kasus dugaan korupsi e-KTP.

Tabel 3.1 Judul Berita Media *Online* Detik dan Liputan6

No	Waktu Publikasi	Judul Berita
DETIK.COM		
1	9 Maret 2017	Sidang Kasus e-KTP Digelar Pagi Ini, Siapa Nama Besar yang Muncul?
2	9 Maret 2017	Sidang Kasus e-KTP dan Bayangan Kecemasan Guncangan Politik
3	9 Maret 2017	Soal Kasus e-KTP, Eks Pimpinan KPK Beri Dukungan pada Penerusnya
4	9 Maret 2017	Kasus e-KTP, Mahfud MD: Ini Pertaruhan KPK dan Masa Depan Bangsa
5	9 Maret 2017	Kasus e-KTP, Refly: Selalu Ada Broker Politik di Proyek Besar
6	9 Maret 2017	Ada Politikus Berpengaruh di Tengah Pusaran Korupsi e-KTP
7	9 Maret 2017	AJI Protes Larangan Siaran Langsung Sidang Kasus e-KTP
8	9 Maret 2017	Perjalanan Megaprojek e-KTP sejak 2010 hingga akan Disidangkan
9	9 Maret 2017	Kasus e-KTP, KPK Jadi Harapan Rakyat Bersihkan Pejabat Korup
10	9 Maret 2017	Sekjen PD ke PN Tipikor: Mau Protes Sidang e-KTP Tidak Boleh Live
11	9 Maret 2017	Kasus e-KTP, ICW: Mustahil Hanya 2 Tersangka di Korupsi Rp 2,3 T
12	9 Maret 2017	Antisipasi Ruang Penuh, Pengadilan Tipikor Sediakan Speaker

13	9 Maret 2017	Sidang Dimulai, Jaksa Bacakan Dakwaan Korupsi e-KTP untuk 2 Terdakwa
14	9 Maret 2017	Pengacara Terdakwa e-KTP: Tak Perlu Geger Kalau Tak Ada Bukti
15	9 Maret 2017	Sidang Kasus e-KTP, Irman-Sugiharto Didakwa Terima Rp 60 M
16	9 Maret 2017	Dakwaan KPK: Novanto-Pejabat Kemdagri Ikut Terlibat Korupsi e-KTP
17	9 Maret 2017	Jaksa Sebut Korupsi e-KTP Rugikan Negara Rp 2,3 Triliun
18	9 Maret 2017	Penikmat Uang Korupsi e-KTP: Dari Marzuki Alie sampai Bendum PDIP
19	9 Maret 2017	Diungkap Jaksa, Begini Peran Novanto di Korupsi e-KTP
20	9 Maret 2017	Dakwaan Dibacakan, Terdakwa e-KTP Coret-coret Berkas
21	9 Maret 2017	Novanto: Saya Tidak Pernah Menerima Apa pun di e-KTP
22	9 Maret 2017	Jaksa Sebut Ganjar Pranowo Terima USD 520 Ribu Terkait Korupsi e-KTP
23	9 Maret 2017	Yasonna Laoly Ikut Disebut Terima USD 84 Ribu di Kasus e-KTP
24	9 Maret 2017	Golkar, Demokrat, dan PDIP Disebut Dapat Jatah Uang Panas e-KTP
25	9 Maret 2017	Anggota Komisi II DPR Dukung Upaya KPK Memberantas Korupsi e-KTP
26	9 Maret 2017	Disebut Terima Uang e-KTP, Marzuki Alie: Kalau Disebut Kenapa?
27	9 Maret 2017	Dewan Pers Minta Pengadilan Izinkan Siaran Langsung Sidang e-KTP
28	9 Maret 2017	Skandal e-KTP, Sugiharto dan Irman Tak Ajukan Eksepsi
29	9 Maret 2017	Ketua Komisi II DPR: e-KTP Bagus tapi Dinodai Korupsi
30	9 Maret 2017	Jaksa akan Hadirkan Total 133 Saksi Sidang Korupsi e-KTP
31	9 Maret 2017	Jaksa KPK dan Pengacara Usul Sidang Korupsi e-KTP 2 Kali Seminggu
32	9 Maret 2017	Hakim Larang Sidang e-KTP Disiarkan Live, KPI: Ini Bukan Orde Baru
33	9 Maret 2017	LPSK Tawarkan Perlindungan Saksi Kasus Korupsi e-KTP
34	9 Maret 2017	Jaksa akan Dahulukan Saksi dari Proses Penganggaran e-KTP
35	9 Maret 2017	Korupsi e-KTP, Jaksa Akan Hadirkan 133 Saksi

		Termasuk Setya Novanto
36	9 Maret 2017	Jaksa: Novanto-Andi Narogong Minta Jatah Rp 574 M di Proyek e-KTP
37	9 Maret 2017	Kasus Korupsi e-KTP, Ganjar Pranowo Bantah Terima USD 520 Ribu
38	9 Maret 2017	Jaksa: Lihat Saja Nanti Mereka yang Tak Ngaku dan Kembalikan Uang
39	9 Maret 2017	Jazuli Juwaini Kaget Ikut Disebut Terima Duit e-KTP
40	9 Maret 2017	Massa Datangi Gedung KPK, Minta Usut Korupsi e-KTP
41	9 Maret 2017	Menko Wiranto: Selain Kasus e-KTP, Ada Hambalang dan Century
42	9 Maret 2017	PDIP Sebut Nama Kadernya Dicatut dalam Korupsi e-KTP
43	9 Maret 2017	Kaget Disebut, Yasonna Laoly Siap Bersaksi di Sidang e-KTP
44	9 Maret 2017	Ketua KPK Temui Massa yang Demo di Depan Gedung KPK
45	9 Maret 2017	Kata KPK soal Realisasi Jatah Duit untuk Novanto di Kasus e-KTP
46	9 Maret 2017	Lewat Surat, Anas Urbaningrum Bantah Ikut Terlibat Kasus e-KTP
47	9 Maret 2017	KPK akan Ungkap 70 Pihak yang Terlibat Kasus e-KTP di Persidangan
48	10 Maret 2017	KY: Siaran Langsung Sidang e-KTP Harus Bersifat Terbatas
49	10 Maret 2017	240 M dari Total Uang Korupsi e-KTP Jadi 'Bancakan' Anggota DPR
50	10 Maret 2017	KPK Cari Bukti Keterlibatan Pihak yang Disebut di Dakwaan e-KTP
51	10 Maret 2017	Menyingkap Kedok Andi Narogong dan Tim Fatmawati di Korupsi e-KTP
52	10 Maret 2017	Banyak yang Terima Aliran Dana e-KTP, KPK: Dikembalikan Lebih Baik
53	10 Maret 2017	Merasa Dicatut di Kasus e-KTP, Marzuki Alie akan Laporkan ke Polisi
54	10 Maret 2017	Dirjen Dukcapil: Program e-KTP Jalan Terus
55	10 Maret 2017	KPK akan Telusuri Indikasi Pencucian Uang dalam Kasus e-KTP
56	10 Maret 2017	Kasus Korupsi e-KTP, Marzuki Laporkan Andi Narogong ke Bareskrim
57	10 Maret 2017	Novanto Masuk Dakwaan Kasus e-KTP, Yorrys: Tak Ada Toleransi!
58	10 Maret 2017	Djamal Disebut Terima Duit e-KTP, Hanura: Dia

		Pindah ke Gerindra
59	10 Maret 2017	Menelusuri Markas Tim Fatmawati yang Diduga Atur Korupsi e-KTP
60	10 Maret 2017	Ada Novanto di Kasus e-KTP, Ical: Jangan Ada yang Desak Munaslub
61	10 Maret 2017	Bakal Dipanggil Jadi Saksi di Sidang e-KTP, Ini Kata Novanto
62	10 Maret 2017	Cerita soal Mobil B 1 KTP Andi Narogong di Markas Tim Fatmawati
63	10 Maret 2017	Dukung KPK Usut Tuntas, Ketum PBNU: Korupsi e-KTP Mengerikan
64	10 Maret 2017	Soal Kasus e-KTP, Novanto: Terima Kasih KPK Sudah Profesional
65	10 Maret 2017	Laporkan Andi Narogong, Marzuki Alie: Kehormatan Saya Terhina
66	10 Maret 2017	Andai Dana e-KTP Tak Dikorupsi, Bisa Buat Apa Saja?
67	10 Maret 2017	Soal Aliran Dana e-KTP ke Parpol, KPK: Kita Lihat di Persidangan
68	10 Maret 2017	Kasus e-KTP, Rumah Andi Narogong di Kota Wisata Sudah 2 Hari Kosong
69	10 Maret 2017	Dirjen Kemdagri Tak Tahu Tim Fatmawati di Balik Kasus e-KTP
70	10 Maret 2017	KPK: Ada 8 Saksi di Persidangan e-KTP Berikutnya
71	10 Maret 2017	KPK: Yasonna Laoly Masih Bisa jadi Saksi
72	10 Maret 2017	2 Orang Terkait e-KTP Meninggal, KPK Sudah Punya Bukti-bukti Lain
73	11 Maret 2017	KPK: Kami akan Koordinasi dengan LPSK Lindungi Saksi Kasus e-KTP
74	11 Maret 2017	ICW: Korupsi e-KTP Rp 2,3 T Kasus Terbesar yang Ditangani KPK
75	11 Maret 2017	Jokowi: Kasus e-KTP Problem Besar, Harus Diproses dengan Benar!
76	11 Maret 2017	Politisi Bicara Misteri Jejak Andi Narogong di Kasus e-KTP
77	11 Maret 2017	Politisi Bicara Misteri Jejak Andi Narogong di Kasus e-KTP (Andi Narogong Tinggalkan Rumah)
78	11 Maret 2017	Politisi Bicara Misteri Jejak Andi Narogong di Kasus e-KTP (Ruko 'Tim Fatmawati' Dijual dan Mobil B 1 KTP)
79	11 Maret 2017	Politisi Bicara Misteri Jejak Andi Narogong di Kasus e-KTP (Novanto Bertemu Andi Narogong Jual Beli Kaus)
80	11 Maret 2017	Politisi Bicara Misteri Jejak Andi Narogong di Kasus e-KTP (Marzuki Alie: Manusianya Saja Saya

		Tidak Tahu)
81	11 Maret 2017	Politisi Bicara Misteri Jejak Andi Narogong di Kasus e-KTP (Olly Dondokambey: Tidak Pernah Bertemu, Gimana Antar Dolar?)
82	11 Maret 2017	Politisi Bicara Misteri Jejak Andi Narogong di Kasus e-KTP (Ganjar Ditunjukkan Foto Andi Narogong)
83	11 Maret 2017	Menkum HAM Disebut Terima Suap e-KTP, Jokowi: Serahkan ke KPK
84	11 Maret 2017	Jokowi soal Kasus e-KTP: Habisnya Rp 6 T Jadinya Cuma KTP Plastik
85	11 Maret 2017	Politikus PDIP: Bohong Jika Menteri Mengaku Tak Tahu Korupsi e-KTP
86	11 Maret 2017	ICW Harap KPK Gunakan TPPU di Kasus e-KTP, Parpol Harus Dijerat
87	12 Maret 2017	Sindiran Jokowi soal e-KTP Plastik dan Harga Satuan Rp 16 Ribu
88	12 Maret 2017	KPK Diminta Tuntaskan Kasus e-KTP, Usut Nama yang Terlibat
89	13 Maret 2017	Penjelasan Eks Pimpinan KPK soal e-KTP Diawasi tapi Dikorupsi
90	13 Maret 2017	Dukung KPK, Demokrat Klarifikasi Kader yang Disebut di Kasus e-KTP
91	13 Maret 2017	Pembuktian Korupsi e-KTP, Ketua KPK: Ikuti Proses Pengadilan
92	13 Maret 2017	Ketua KPK: Sebentar Lagi, Tersangka Kasus e-KTP akan Bertambah
93	13 Maret 2017	Begini Posisi Terakhir Sebaran e-KTP dan Permasalahannya
94	13 Maret 2017	KPK: UU 30/2002 Efektif Usut Kasus Termasuk e-KTP, Tak Perlu Revisi
95	13 Maret 2017	Siapa Calon Tersangka Baru Kasus Korupsi e-KTP?
96	13 Maret 2017	KPK: Pengembalian Uang Hasil Korupsi e-KTP Tak Hapus Pidana
97	13 Maret 2017	Ada Kasus Korupsi e-KTP, Novanto: Golkar Tetap Solid dan Kompak
98	13 Maret 2017	Bantah Terima Duit Korupsi e-KTP, Golkar Siapkan Langkah Hukum
99	13 Maret 2017	Ngobrol Bersama Jokowi, Fadli Zon: Bahas soal e-KTP dan Freeport
100	13 Maret 2017	Kasus e-KTP, Fadli Zon: Kalau Memang Ada Korupsi, Buktikan Saja
101	13 Maret 2017	Novanto Disebut di Kasus e-KTP, Sekjen Golkar: Tak Ada Munaslub
102	13 Maret 2017	Banyak Pihak Bantah Terima Duit e-KTP, KPK:

		Debatnya di Pengadilan
103	13 Maret 2017	KPK: Meski Ada Kasus, Layanan e-KTP Jangan Ganggu Publik
104	13 Maret 2017	Soal Kasus e-KTP, PKB: Kami Siap Diaudit
105	13 Maret 2017	Eks Ketua PPAK Bicara soal Korupsi Proyek e-KTP
106	14 Maret 2017	Penjelasan KPK soal Parpol yang Disebut Terima Jatah di Kasus e-KTP
107	14 Maret 2017	Calon Tersangka Baru dan Banyaknya Pihak Terlibat di Kasus e-KTP
108	14 Maret 2017	Dorong Hak Angket Kasus e-KTP, Fahri Minta Dukungan Pemerintah
109	14 Maret 2017	Fahri Hamzah Serang Ketua KPK Agus Rahardjo soal Kasus e-KTP
110	14 Maret 2017	Fahri Ngotot Ajukan Hak Angket Kasus e-KTP, KPK: Jangan Berlebihan
111	14 Maret 2017	Agus Rahardjo Diserang Fahri, KPK: Jangan Ganggu Penuntasan Kasus
112	14 Maret 2017	Banyak Nama Disebut di Kasus e-KTP, Wapres JK: Tunggu Saja
113	14 Maret 2017	Didesak Fahri untuk Mundur, Agus Rahardjo: Gusti Allah Mboten Sare
114	14 Maret 2017	Saat di LKPP, Agus Rahardjo Beri Banyak Catatan untuk Proyek e-KTP
115	14 Maret 2017	Begini Catatan LKPP soal Proyek e-KTP Saat Dipimpin Agus Rahardjo
116	14 Maret 2017	Dewan Pakar Golkar Gelar Rapat, Bahas Kasus Korupsi e-KTP?
117	14 Maret 2017	Fahri Desak Ketua KPK Mundur, PDIP: Tidak Perlu Gaduh
118	14 Maret 2017	Ada Kasus Korupsi e-KTP, Dewan Pakar Golkar Minta Kader Tenang
119	14 Maret 2017	Dewan Pakar Golkar Percaya Novanto Tetap Bisa Pimpin Partai
120	14 Maret 2017	Wanhor Golkar akan Bahas Kasus Korupsi e-KTP dengan BJ Habibie
121	14 Maret 2017	Kasus e-KTP, Mahfud: Hak Angket Timbulkan Kesan Lindungi Teman
122	14 Maret 2017	Pimpinan DPR: Sosialisasi UU Perlu, Termasuk Revisi UU KPK
123	14 Maret 2017	Wanhor Sarankan Golkar Tak Ikut Gulirkan Hak Angket e-KTP
124	14 Maret 2017	KPK: Beberapa Saksi di Kasus e-KTP Masih Dicegah ke Luar Negeri
125	14 Maret 2017	KPK: Banyak Anggota DPR Dukung Penuntasan

		Kasus e-KTP
126	14 Maret 2017	KPK: Publik Harus Kawal Penuntasan Kasus e-KTP
127	15 Maret 2017	Fahri Hamzah Usul Hak Angket e-KTP, Pukat UGM: Dia Bermain Politik
128	15 Maret 2017	Wacana Hak Angket e-KTP oleh Fahri Dinilai Belum Mendesak
129	15 Maret 2017	Fahri Ajukan Hak Angket Kasus e-KTP, PDIP: Itu Kurang Tepat
130	15 Maret 2017	Ketua KPK Cerita soal Disiplin Tolak Gratifikasi di Singapura
131	15 Maret 2017	Ketua KPK: Ada Kasus yang Dugaan Kerugiannya Lebih Besar dari e-KTP
132	15 Maret 2017	Agus Rahardjo Jawab Tudingan Fahri: Yakinlah, Itu Semua Tak Terjadi
133	15 Maret 2017	Solo Kehabisan Blangko e-KTP
134	15 Maret 2017	Soal Wacana Hak Angket Kasus e-KTP, Golkar: Jangan Gosip Terus
135	15 Maret 2017	Mereka yang Masih Dicegah ke Luar Negeri Terkait Kasus e-KTP
136	15 Maret 2017	Kasus Apa yang Lebih Besar Nilai Kerugiannya Dibanding e-KTP?
137	15 Maret 2017	Fraksi Golkar: Munaslub Cuma Rumor, Ada yang Mau Ambil Keuntungan
138	15 Maret 2017	Sidang Kasus e-KTP, Jaksa KPK akan Hadirkan Saksi dari Kemendagri
139	15 Maret 2017	PPP Ogah Ikut-ikutan Hak Angket Kasus Korupsi e-KTP
140	15 Maret 2017	Ada Kasus e-KTP, Golkar Yakin Elektabilitas Tak Terganggu
141	15 Maret 2017	Ganjar Pranowo Didoakan Siswa di Demak Terkait Isu Korupsi e-KTP
142	15 Maret 2017	Kasus e-KTP, KPK: Ada 9 Orang yang Masih Dicegah ke Luar Negeri
143	15 Maret 2017	Golkar akan Gelar Rapat Konsultasi Nasional di Bali
144	15 Maret 2017	Fahri Tantang KPK Buka Semua Nama yang Terima Duit Korupsi e-KTP
145	15 Maret 2017	KPK: 14 Nama yang Kembalikan Uang Tak Diumumkan Karena Kooperatif
146	15 Maret 2017	Penjelasan KPK soal Banyak Nama Tak Disebut di Kasus e-KTP
147	15 Maret 2017	Mendagri: Kami Jadi Terlalu Hati-hati Lanjutkan e-KTP
LIPUTAN6.COM		
148	9 Maret 2017	Ramai-Ramai Tolak Terlibat Kasus E-KTP
149	9 Maret 2017	Tanggapan KPK soal Larangan Live di Sidang E-

		KTP
150	9 Maret 2017	Setya Novanto Bantah Urus Anggaran E-KTP Saat Jadi Ketua Fraksi
151	9 Maret 2017	Sidang Perdana Kasus E-KTP Digelar Hari Ini
152	9 Maret 2017	Sidang Kasus E-KTP Gunakan Ruang Sidang Bekas Jessica Wongso
153	9 Maret 2017	Fadli Zon Ajak Lihat Fakta Hukum soal Nama Besar di Kasus E-KTP
154	9 Maret 2017	KPK Tak Peduli Dampak Politik Kasus E-KTP
155	9 Maret 2017	Ini yang Akan Dibuktikan KPK dalam Kasus E-KTP
156	9 Maret 2017	Terseret Kasus Proyek E-KTP, Setya Novanto Berharap Golkar Tabah
157	9 Maret 2017	Setya Novanto: Jangan Sampai Politik Gaduh karena Kasus E-KTP
158	9 Maret 2017	MA Dukung Sidang Kasus E-KTP Tak Boleh Disiarkan Langsung
159	9 Maret 2017	Febri Diansyah: DPR Jangan Ganggu KPK Lagi
160	9 Maret 2017	Hadiri Sidang E-KTP, Sekjen Demokrat Kritik Larangan Siaran Live
161	9 Maret 2017	Jaksa: Setya Novanto Ikut Pertemuan dengan Terdakwa E-KTP
162	9 Maret 2017	Kasus E-KTP, 2 Eks Pejabat Kemendagri Terancam Bui Seumur Hidup
163	9 Maret 2017	Setya Novanto: Demi Allah Saya Tidak Terima Apa pun dari E-KTP
164	9 Maret 2017	Daftar Nama Besar yang Terseret Kasus E-KTP
165	9 Maret 2017	Ketika Fahri Hamzah Komentari Kasus E-KTP di Twitter
166	9 Maret 2017	Jaksa KPK Beberkan Penerima Aliran Dana Kasus E-KTP
167	9 Maret 2017	Yasonna Laoly: Soal Aliran Dana E-KTP, Saya Tidak Ikut
168	9 Maret 2017	Dakwaan Kasus E-KTP Sebut Gamawan Fauzi Terima US\$ 4,5 juta
169	9 Maret 2017	Setnov: Saya Tidak Pernah Bertemu Nazaruddin Terkait E-KTP
170	9 Maret 2017	Jaksa: Olly Dondokambey Terima 1,2 Juta Dolar di Kasus E-KTP
171	9 Maret 2017	Namanya Disebut di Kasus E-KTP, Ketua Fraksi PKS Jazuli Terkejut
172	9 Maret 2017	Ini Rincian Korupsi Berjemaah dalam Kasus E-KTP
173	9 Maret 2017	Jaksa: 49 Persen Anggaran E-KTP Dinikmati Para Pejabat
174	9 Maret 2017	Kata Marzuki Alie Usai Disebut Terima Uang di

		Dakwaan Kasus E-KTP
175	9 Maret 2017	3 Parpol Disebut dalam Dakwaan Terima Aliran Dana Kasus E-KTP
176	9 Maret 2017	Jaksa Pastikan Tak Ada Nama Ahok di Berkas Dakwaan Kasus E-KTP
177	9 Maret 2017	Jaksa: Auditor BPK Ikut Terima Aliran Dana Suap e-KTP
178	10 Maret 2017	Benarkah PNS Kemenkeu Kecipratan Duit Suap E-KTP?
179	10 Maret 2017	Perseteruan Gamawan Fauzi Vs Ahok soal E-KTP
180	10 Maret 2017	Marzuki Alie Laporkan Andi Narogong Terkait Kasus E-KTP
181	10 Maret 2017	Dipanggil Jadi Saksi Kasus E-KTP, Setya Novanto Pasrah
182	10 Maret 2017	Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi E-KTP
183	10 Maret 2017	Kemenkeu Investigasi Ditjen Anggaran soal Dugaan Korupsi E-KTP
184	10 Maret 2017	Senjata Baru KPK Jerat Korporasi Diduga Terlibat Korupsi E-KTP
185	10 Maret 2017	Setya Novanto Prihatin Golkar Tersangkut Kasus E-KTP
186	10 Maret 2017	Ganjar: Saya Lega Pernah Dikonfrontasi KPK di Kasus E-KTP
187	10 Maret 2017	Respons KPK soal Bantahan Anggota DPR yang Diduga Korupsi E-KTP
188	10 Maret 2017	Golkar: Tak Ada Toleransi bagi yang Terlibat Korupsi
189	10 Maret 2017	Eks Penasihat KPK: Mendagri Baiknya Hentikan Proyek E-KTP
190	11 Maret 2017	Menanti Sengatan Kedua KPK di Kasus E-KTP
191	11 Maret 2017	Marzuki Alie: Saya Siap Jadi Saksi Kasus Korupsi E-KTP
192	11 Maret 2017	Ketua Fraksi PKS di DPR Bantah Terima Suap E-KTP
193	11 Maret 2017	Taktik KPK Buktikan Dugaan Korupsi Anggota DPR di Kasus E-KTP
194	11 Maret 2017	KPK: Bantahan Anggota DPR Tak Hentikan Penyidikan E-KTP
195	11 Maret 2017	KPK: Kemungkinan Ada Saksi Baru Didatangkan di Sidang e-KTP
196	11 Maret 2017	Ahok Sebut Kasus e-KTP Tak Ganggu Kampanyenya
197	11 Maret 2017	Kata Jokowi soal Nasib Program E-KTP Setelah Tersandung Kasus

198	11 Maret 2017	Jokowi: Berantakan Semua Gara-Gara Anggaran E-KTP Dikorup
199	11 Maret 2017	PDIP: Tidak Ada Bantuan Hukum untuk Kader Korupsi E-KTP
200	11 Maret 2017	ICW: Korupsi E-KTP Kasus Paling Besar Ditangani KPK
201	11 Maret 2017	Menteri Rini Bakal Pecat Direksi BUMN yang Terlibat Korupsi e-KTP
202	11 Maret 2017	Marzuki Alie Siap Dipanggil KPK Terkait Kasus E-KTP
203	11 Maret 2017	Jusuf Kalla: Kasus e-KTP Tak Akan Sebabkan Turbulensi Politik
204	12 Maret 2017	Kecewa Jokowi pada Kasus Korupsi e-KTP
205	12 Maret 2017	Politikus Hanura Miryam Haryani Siap Diperiksa soal Kasus e-KTP
206	12 Maret 2017	Cara KPK Berikan Perlindungan ke Saksi Kasus e-KTP
207	12 Maret 2017	Marzuki Alie Kembali Tegaskan Tak Terlibat Kasus E-KTP
208	12 Maret 2017	Korupsi e-KTP Pertanda Upeti ke Pengusaha Masih Marak Terjadi
209	13 Maret 2017	Pembuktian Nyanyian M Nazaruddin
210	13 Maret 2017	Kasus E-KTP, Menumpukan Harapan ke KPK
211	13 Maret 2017	Politikus Golkar: Hadapi Nama Besar Kasus E-KTP, KPK Naik Kelas
212	13 Maret 2017	Ketua KPK Pastikan Ada Tersangka Baru Kasus e-KTP
213	13 Maret 2017	Menteri Rini Diminta Copot Pejabat BUMN Terlibat Kasus E-KTP
214	13 Maret 2017	Strategi KPK Buktikan Dakwaan Korupsi E-KTP
215	13 Maret 2017	Proyek E-KTP Terbongkar, Dua Kementerian Minta Pendampingan KPK
216	13 Maret 2017	KPK Siapkan 8 Saksi di Sidang Kedua Kasus e-KTP
217	13 Maret 2017	Ketua MPR: Kasus E-KTP Urusan KPK, Tak Perlu Ada Angket DPR
218	13 Maret 2017	Komisi II DPR Pastikan Pengadaan E-KTP Terus Jalan
219	13 Maret 2017	Tanggapan Sri Mulyani soal Kasus Korupsi e-KTP
220	13 Maret 2017	Mantan Wakil Ketua Komisi II Bantah Terima Duit Suap Kasus e-KTP
221	13 Maret 2017	Tanggapan Demokrat Disebut Terima Aliran Dana di Kasus E-KTP
222	14 Maret 2017	KPK Pertimbangkan Pakai UU Parpol Jerat Korporasi di Kasus E-KTP

223	14 Maret 207	KPK Harap Pengadaan e-KTP Tak Terganggu Kasus Korupsi
224	14 Maret 207	Keterlibatan Nama-Nama Besar di Kasus E-KTP Siap Dibuktikan KPK
225	14 Maret 207	Bukti dan Sumpah di Kasus E-KTP
226	14 Maret 207	KPK: Kami Tidak Butuh Revisi UU
227	14 Maret 207	KPK Siap Uraikan Aliran Dana E-KTP ke Parpol
228	14 Maret 207	Khatibul Umam Kaget Namanya Disebut dalam Dakwaan Kasus E-KTP
229	14 Maret 207	Tak Terima Suap, Ahok Tak Terganggu Kasus Korupsi e-KTP
230	14 Maret 207	Fahri Hamzah Minta Ketua KPK Agus Rahardjo Mundur
231	14 Maret 207	Hadirkan 8 Saksi, KPK Siap Bongkar Kasus e-KTP
232	14 Maret 207	Fahri Hamzah: Banyak yang Presiden Belum Tahu soal E-KTP
233	14 Maret 207	Jokowi Nyatakan Tak Bahas e-KTP dengan Pimpinan Lembaga Tinggi
234	14 Maret 207	Fahri Hamzah: Jokowi Bersih dari Kasus E-KTP
235	14 Maret 207	Ada Kejanggalan di Dakwaan Kasus E-KTP? Ini Pembelaan KPK
236	14 Maret 207	Disebut Terlibat Kasus E-KTP, Ini Tanggapan Tamsil Linrung
237	14 Maret 207	KPK Cegah ke Luar Negeri Pengatur Suap E-KTP Andi Narogong
238	15 Maret 2017	Budiman PDIP Tantang Dikonfrontir dengan Agen Suap E-KTP
239	15 Maret 2017	Mendagri Persilakan Fahri Hamzah Perjelas Kasus e-KTP ke KPK
240	15 Maret 2017	Setya Novanto Terseret Kasus E-KTP, Kader Golkar Minta Munaslub
241	15 Maret 2017	Kekesalan Mendagri Tjahjo soal Kasus Korupsi e-KTP
242	15 Maret 2017	Curhat Ganjar Pranowo dan Arif Wibowo PDIP soal Kasus E-KTP
243	15 Maret 2017	KPK Mengaku Ada Intervensi Tangani Kasus Korupsi E-KTP
244	15 Maret 2017	Mendagri: Ada 4,5 Juta Penduduk Belum Dapat E-KTP
245	15 Maret 2017	Demokrat Pastikan Nama Partainya Dicatut untuk Kasus e-KTP
246	15 Maret 2017	KPK Minta DPR Pertimbangkan Keinginan Gulirkan Hak Angket E-KTP

247	15 Maret 2017	3 Anggota DPR yang Disebut dalam Dakwaan E-KTP Hadiri Paripurna
248	15 Maret 2017	Ketua KPK Akan Buktikan di Pengadilan soal Terlibat Kasus E-KTP
249	15 Maret 2017	KPK: Kami Lagi Usut Kasus yang Lebih Besar dari E-KTP
250	15 Maret 2017	Beredar Isu Kasus e-KTP Picu Munaslub Golkar, Ini Kata Ceu Popong
251	15 Maret 2017	KPK Cegah 3 Orang Ini ke Luar Negeri Terkait Kasus e-KTP
252	15 Maret 2017	KPK: Kasus E-KTP Bukan Dendam Pribadi Pimpinan
253	15 Maret 2017	Lubang di Dakwaan Kasus E-KTP

3.4 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan suatu informasi yang membantu peneliti yang ingin menggunakan variabel yang sama. Peneliti akan mengerti bagaimana menggunakan cara pengukuran atas variabel yang dilakukan apakah prosedur pengukuran yang sama diperlukan prosedur pengukuran yang baru (Effendi, 2003, h. 241). Variabel merupakan fenomena dan peristiwa yang dapat dimanipulasi dalam sebuah proses riset.

Dalam memaparkan definisi operasionalisasi dari konsep objektivitas, peneliti mengelompokkan konsep operasionalisasi variabel ke dalam tabel, yakni.

Tabel 3.2 Konsep Operasionalisasi Variabel

Konsep	Variabel	Dimensi	Indikator	Item	Skala
Objektivitas	Faktualitas	Keberanan	Fakta Sosiologis	1. Ada	Nominal
				2. Tidak Ada	
			Fakta Psikologis	1. Ada	Nominal
				2. Tidak Ada	
		Fakta Kombinasi	1. Ada	Nominal	
			2. Tidak Ada		
	Akurasi	Pencantuman	1. Ada	Nominal	

			Waktu	2. Tidak Ada	Nominal		
			Atribusi	1. Jelas 2. Tidak Jelas			
		Relevansi	Nilai Berita	1. Ada	2. Tidak Ada	Nominal	
				2. Tidak Ada			
		Imparsialitas	Keberimbangan	<i>Cover Both Side</i>	1. Ya	2. Tidak	Nominal
					2. Tidak		
			Netralitas	Pencampuran Fakta dan Opini	1. Ada	2. Tidak Ada	Nominal
					2. Tidak Ada		
			Kesesuaian Judul dan Isi Berita	Dramatisasi	1. Ya	2. Tidak	Nominal
					2. Tidak		
			Kesesuaian Data Pendukung dan Isi Berita	Kesesuaian Judul dan Isi Berita	1. Ada	2. Tidak Ada	Nominal
		2. Tidak Ada					
Kesesuaian Data Pendukung dan Isi Berita	Kesesuaian Judul dan Isi Berita	1. Ya	2. Tidak	Nominal			
		2. Tidak					

Sumber: Kriyantono (2009, h. 242-248)

Agar variabel dapat diukur, variabel harus dijelaskan ke dalam konsep operasionalisasi variabel melalui parameter dan indikator-indikatornya (Bungin, 2006, h.60). Dalam meneliti objektivitas pemberitaan yang diteliti, definisi operasionalisasinya sebagai berikut.

Objektivitas adalah sebuah sikap atau penilaian tertentu yang menerapkan netralitas atau tidak adanya campur tangan oleh pihak manapun dalam menyampaikan berita, sesuai dengan fakta, dan tidak berpihak pada kelompok tertentu (McQuail, 2012, h. 222). Objektivitas dibagi menjadi dua variabel, yaitu faktualitas dan imparsialitas.

Faktualitas merujuk pada kebenaran dan realita dalam sebuah berita berkaitan dengan peristiwa dan pernyataan yang sumber dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, dapat terhindar dari pandangan subjektivitas

atau opini wartawan. Dalam hal ini, seorang jurnalis harus melaporkan sebuah peristiwa yang terjadi secara apa adanya, tanpa dikurangi atau ditambah demi menarik perhatian khalayak.

Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan berita-berita terkait kasus korupsi e-KTP ke dalam tiga jenis fakta.

Tabel 3.3 Dimensi Kebenaran

Indikator	Keterangan
Fakta Sosiologis	Fakta sosiologis dibuat berdasarkan hasil pengamatan wartawan secara langsung di lapangan atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Fakta sosiologis harus memiliki kelengkapan unsur 5W + 1H (<i>what, who, where, when, why, how</i>). Unsur-unsur itu yang membantu wartawan untuk menulis berita secara akurat dan sesuai dengan kenyataan yang ada.
Fakta Psikologis	Jika berita mencantumkan pernyataan narasumber terkait masalah yang akan dipublikasikan oleh wartawan, disitulah berita dianggap mengandung fakta psikologis.
Kombinasi	Jika dalam berita menggabungkan fakta sosiologis dan fakta psikologis secara adil atau seimbang, berita tersebut dapat dikatakan mengandung kombinasi fakta

Selain itu, kebenaran dapat diukur berdasarkan variabel keakuratan dalam informasi. Keakuratan informasi seperti fakta dan kuantitas perlu dikonfirmasi kebenaran dan ketepatannya sebelum berita disajikan ke khalayak. Dalam penelitian ini, akurasi dibagi ke dalam dua dimensi, yaitu pencantuman waktu terjadinya peristiwa dan atribusi.

Adanya pencantuman waktu bertujuan untuk mengetahui kapan terjadinya peristiwa tersebut. Pencantuman dimensi ini dapat melihat akurasi fakta dan opini dalam sebuah berita. Pencantuman waktu terjadinya peristiwa sebagai berikut.

Tabel 3.4 Dimensi Akurasi Indikator Pencantuman Waktu

Indikator	Keterangan
Ada Pencantuman Waktu	Bila berita tersebut mencantumkan waktu terjadinya peristiwa. Waktu yang dimaksud berupa tanggal, kata-kata atau suatu pernyataan tentang waktu dan sekaligus keduanya.
Tidak Ada Pencantuman Waktu	Bila berita tersebut tidak mencantumkan waktu terjadinya peristiwa, seperti tanggal, kata-kata atau pernyataan tentang waktu dan keduanya

Atribusi merupakan pencantuman sumber berita secara jelas. Identitas sumber berita dicantumkan dalam berita berupa nama, jabatan, ataupun hal yang dapat memungkinkan untuk dikonfirmasi. Atribusi terdapat dua bagian sebagai berikut.

Tabel 3.5 Dimensi Akurasi Indikator Atribusi

Indikator	Keterangan
Jelas	Atribusi dapat dikatakan jelas jika dalam berita dicantumkan identitas berupa nama, pekerjaan, atau sesuatu hal lain yang memungkinkan dapat di konfirmasi.
Tidak Jelas	Bila berita tidak dicantumkan identitas sumber berita seperti nama, pekerjaan, atau sesuatu hal lain yang memungkinkan dapat di konfirmasi

Setelah dimensi pertama tentang kebenaran, dimensi kedua tentang akurasi, selanjutnya dimensi ketiga yaitu relevansi. Sebuah berita dapat dipercaya dan dapat dikatakan sebagai berita yang layak untuk dipublikasikan ke khalayak, apabila memenuhi persyaratan nilai berita atau *news value*. Yang berkaitan dengan nilai berita yaitu *proximity* psikografis, *proximity* geografis, *timeless*, *significance*, *magnitude*, dan *prominence* (Kriyantono, 2009, h.242). Relevansi terdapat menjadi dua bagian, yakni.

Tabel 3.6 Dimensi Relevansi Indikator Nilai Berita

Indikator	Keterangan
Ada Nilai Berita	Jika berita tersebut memiliki salah satu dari nilai berita seperti <i>proximity</i> psikografis, <i>proximity</i> geografis, <i>timeless</i> , <i>significance</i> , <i>magnitude</i> , dan <i>prominence</i> .
Tidak ada Nilai Berita	Jika berita tidak memiliki salah satu dari nilai berita seperti <i>proximity</i> psikografis, <i>proximity</i> geografis, <i>timeless</i> , <i>significance</i> , <i>magnitude</i> , dan <i>prominence</i>

Mengukur objektivitas dalam pemberitaan, salah satu variabel lainnya yang penting adalah imparisialitas. Imparsialitas atau ketidakberpihakan pemberitaan merupakan keseimbangan penulisan pada berita (*balance*). Dimensi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu keseimbangan dan netralitas.

Keseimbangan sangat penting ditunjukkan dalam sebuah berita. Berita dapat dikatakan *balance* apabila konflik tersebut dilihat dari dua perspektif dari masing-masing pihak dan memberikan porsi yang sama dalam memberitakan peristiwa tersebut. Keseimbangan dapat dilihat dari ada atau tidak ada *source bias* seperti tidak seimbang sumber berita tersebut, ada atau tidaknya *slant* (kecenderungan berpihak), dan ketidakseimbangan (Kriyantono, 2009, h. 242-243).

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan indikator *cover both sides* saja, walaupun dalam keseimbangan terbagi menjadi dua yaitu *cover both sides* dan *sides*. Hal ini peneliti lakukan karena media yang diteliti merupakan media *online* sehingga tidak memungkinkan untuk memasukan indikator *sides* (ukuran fisik kolom). *Cover both sides* merupakan pernyataan dari dua atau lebih

narasumber secara bersamaan sehingga berita dapat seimbang. *Cover both sides* terbagi menjadi dua, yakni.

Tabel 3.7 Dimensi Keberimbangan Indikator *Cover Both Sides*

Indikator	Keterangan
Ya	Jika menghadirkan pemikiran narasumber dalam artikel berita dengan memberikan porsi yang sama untuk mereka memberikan pernyataan secara bersamaan.
Tidak	Jika menghadirkan pemikiran narasumber dalam artikel berita dengan tidak memberikan porsi yang sama untuk mereka memberikan pernyataan secara bersamaan.

Selanjutnya dimensi dari imparsialitas adalah netralitas, netralitas merupakan kejujuran dalam menyajikan berita dan tidak adanya keberpihakan media pada satu pihak. Netralitas dapat dilihat dari sensasionalism, *stereotype*, *junxtaposition* seperti membandingkan dua hal yang tidak sebanding dan *linkpages* seperti membandingkan dua hal yang tidak relevan (Kriyantono, 2009, h. 242). Netralitas secara umum dibagi menjadi dua, yaitu non evaluatif dan non sensasional.

Netralitas non evaluatif terikat dengan ada atau tidaknya pencampuran fakta dan opini wartawan saat menulis berita. Adanya pencampuran fakta dan opini apabila terdapat kata-kata *opinionative* dari wartawan seperti tampaknya, diperkirakan, seakan-akan, terkesan, kesannya, seolah, agaknya, diramalkan, kontroversi, mengejutkan, maneuver, sayangnya, dan lainnya (Kriyantono, 2009, h. 243). Netralitas dibagi menjadi dua, yakni ada dan tidak adanya pencampuran fakta dan opini.

Tabel 3.8 Dimensi Netralitas Indikator Pencampuran Fakta dan Opini

Indikator	Keterangan
------------------	-------------------

Ada Pencampuran Fakta dan Opini	Jika berita terdapat salah satu kata atau lebih seperti tampaknya, diperkirakan, seakan-akan, terkesan, kesannya, seolah, agaknya, diramalkan, kontroversi, mengejutkan, maneuver, sayangnya, dan lainnya
Tidak ada Pencampuran Fakta dan Opini	Jika berita tidak terdapat salah satu kata atau lebih seperti tampaknya, diperkirakan, seakan-akan, terkesan, kesannya, seolah, agaknya, diramalkan, kontroversi, mengejutkan, maneuver, sayangnya, dan lainnya

Netralitas non sensasional menunjukkan aspek sensasionalisme dalam pemberitaan, sensasionalisme itu sendiri artinya sifat yang menimbulkan sensasi. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian, dalam jurnalistik tidak diperbolehkan dalam objektivitas pemberitaan (McQuail, 2012, h. 224). Netralitas non sensasional terbagi menjadi dua indikator, yakni kesesuaian judul dengan isi berita dan dramatisasi.

Kesesuaian judul dengan isi berita menyangkut dengan aspek relevansi, apakah kalimat judul utama (bukan subjudul) merupakan bagian dari kalimat yang sama dengan isi berita atau kutipan yang jelas-jelas ada dalam isi berita (Kriyantono, 2009, h. 246). Dengan demikian terbagi menjadi dua, yakni.

Tabel 3.9 Dimensi Netralitas Indikator Kesesuaian Judul dan Isi

Indikator	Keterangan
Ya Sesuai Judul dan Isi	Bila judul menjadi bagian dari kalimat yang sama pada isi berita atau kutipan yang jelas-jelas ada di dalam berita
Tidak Sesuai Judul dan Isi	Bila judul bukan menjadi bagian dari kalimat yang sama pada isi berita atau kutipan yang jelas-jelas ada di dalam berita

Selanjutnya, dramatisasi merupakan sebuah berita yang melebih-lebihkan fakta dengan kata-kata bahasa hiperbola yang digunakan dalam isi berita. Hal

tersebut digunakan biasanya untuk menimbulkan efek dramatis pada sebuah peristiwa yang ada didalam berita. Efek dramatis digunakan untuk menarik pembaca dalam mendalami secara langsung peristiwa tersebut. Tetapi, hal ini membuat berita menjadi tidak objektif, dramatisasi terbagi menjadi dua yakni.

Tabel 3.10 Dimensi Netralitas Indikator Dramatisasi

Indikator	Keterangan
Ada Unsur Dramatisasi	Jika dalam berita tersebut dapat disajikan dengan kata-kata yang melebihkan fakta atau menggunakan bahasa hiperbola pada judul dan isi berita
Tidak Ada Unsur Dramatisasi	Jika dalam berita tersebut tidak disajikan dengan kata-kata yang melebihkan fakta atau menggunakan bahasa hiperbola pada judul dan isi berita

Selain itu, terdapat indikator kesesuaian data pendukung dan isi, dimana indikator ini merupakan indikator yang dikembangkan oleh peneliti. Penggunaan data pendukung yang ditampilkan dalam berita biasanya digunakan untuk melengkapi informasi atas kejadian tersebut. Data pendukung berupa menggunakan tabel, statistik, foto, ilustrasi gambar, dan lainnya. Penggunaan data pendukung terbagi menjadi dua, yakni.

Tabel 3.11 Dimensi Netralitas Indikator Kesesuaian Data Pendukung dan Isi

Indikator	Keterangan
Ya Sesuai Data Pendukung dan Isi	Jika data pendukung seperti tabel, statistik, foto, ilustrasi gambar, buku, UU, dan lainnya bagian yang sama atau sesuai dengan isi berita
Tidak Sesuai Data Pendukung dan Isi	Jika data pendukung seperti tabel, statistik, foto, ilustrasi gambar, buku, UU, dan lainnya bagian yang tidak sama atau tidak sesuai dengan isi berita.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data adalah salah satu prosedur yang dapat menentukan baik tidaknya riset. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data (Kriyantono, 2009, h. 93).

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah cara mengumpulkan data primer dan data sekunder.

3.5.1 Data Primer

Peneliti mengumpulkan data secara langsung tentang berita-berita yang terkait isu kasus korupsi e-KTP. Peneliti mengambil sampel berita terkait isu kasus korupsi e-KTP pada media *online* Detik dan Liputan6 dengan periode yang telah ditentukan yakni 9 Maret hingga 15 Maret 2017. Sampel yang didapat oleh peneliti yang menjadi data primer dalam penelitian ini

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari kajian pustaka dengan mempelajari buku-buku, jurnal dan situs internet yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data ini bersifat melengkapi data primer yakni untuk membantu peneliti bila data primer terbatas dan sulit diperoleh.

3.6 Uji Reliabilitas

Melakukan uji reliabilitas merupakan hal yang penting untuk mendapatkan indikator yang sesuai dengan tujuan dan reliabel suatu penelitian. Menurut Eriyanto (2011, h. 281) alat ukur tidak hanya harus valid tetapi harus mempunyai reliabilitas (keandalan) yang tinggi. Alat ukur yang reliabel seharusnya mendapatkan hasil yang sama dari serangkaian gejala yang sama, tanpa terganutng kepada keadaan (Krippendorff, 2006, dikutip dalam Eriyanto, 2011, h. 282).

Pada penelitian ini, peneliti melakukan riset dengan cara mengkodekan sampel ke dalam variabel. Variabel yang dibuat peneliti belum memiliki standar yang teruji, maka dari itu dilakukan uji reliabilitas. Kegiatan ini dilakukan oleh orang lain yang mengetahui tentang objektivitas dalam berita atau seseorang yang memiliki pengalaman minimal satu tahun bekerja di media khususnya di dalam pemberitaan atau *news*. Uji ini dikenal sebagai uji antar *coder*.

Dalam analisis ini, alat ukur yang peneliti pakai adalah lembar *coding* (*coding sheet*). Sesuai standar pengambilan sampel minimal, dalam pengujian reliabilitas biasanya menggunakan minimal 10% dari jumlah seluruh sampel (Wimmer & Dominick, 2011, h. 57). Saat pemilihan 10% dari semua sampel yang terdiri dari 253 artikel berita, peneliti mendapatkan 25,3 artikel dan dibulatkan menjadi 25 artikel dengan teknik *simple random sampling*. Teknik *simple random sampling* dalam penerapannya mengambil sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi (Sugiyono, 2012, h.93).

Pemilihan artikel berita, peneliti menggunakan *website* statistik yaitu www.random.org untuk mendapatkan 10% artikel berita secara acak dari

Detik.com dan Liputan6.com. Dalam *website* ini, peneliti dapat mengunduh angka-angka acak dalam jumlah berapa pun. Pengujian ini dilakukan guna mencari persamaan dan perbedaan hasil dari alat ukur dan *coder* berbeda. Pada proses pengodingan peneliti memutuskan menggunakan dua *coder* yang berkompeten, yakni Rima Kosasih selaku wartawan media *online* Okezone sebagai *coder* pertama dan *coder* kedua Fellya Hartono selaku *News Reporter* di Net TV.

Data dari kedua *coder* akan dibandingkan untuk menunjukkan dalam persentase kesesuaian atau tidak antara *coder*. Data yang akan dianalisis menggunakan rumus yang diperkenalkan oleh R. Holsti. Formula Holsti ini reliabilitas ditunjukkan dalam persentase persetujuan, seberapa besar persamaan antar *coder* ketika menilai suatu isi (Eriyanto, 2011, h. 290):

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

- Keterangan :
- CR : *Coefficient Reliability* (Koefisien Relibialitas)
 - M : Jumlah Pernyataan yang sama (disetujui dua koder)
 - N : Jumlah *coding* yang dibuat *coder* satu dan dua

Menurut R. Holsti, formula ini angka reliabilitas minimum yang di toleransi adalah 0,7 atau 70%. Jika hasil perhitungan menunjukkan angka reliabilitas di atas 0,7 artinya alat ukur tersebut benar-benar reliabel atau dapat diandalkan. Sedangkan, jika angka di bawah 0,7 berarti alat ukur (*coding sheet*) bukan alat yang dapat diandalkan (Eriyanto, 2011, h. 290)

Sebelum proses pengkodean, peneliti memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai tata cara pengisian lembar *coding* (*coding sheet*). Selain itu, peneliti juga memberikan penjelasan pada setiap variabel yang digunakan untuk unit analisis. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan persepsi yang sama sehingga peneliti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Peneliti pun memberikan sampel berita, *coding book*, dan *coding sheet* kepada kedua *coder*. *Coding book* diberikan bertujuan untuk menjadi protokol, tujuan utamanya agar *coder* yang terlibat dalam penelitian mempunyai pemahaman yang sama baik dari tujuan penelitian, isi, hingga menentukan kategori yang sesuai (Riffe, *et al*, 1998 dikutip dalam Eriyanto, 2011, h. 222)

Hasil dari pengodean kedua *coder* akan diuji reliabilitasnya menggunakan rumus R.Holsti. Hasilnya berupa realibilitas setiap variabel yang sudah ditentukan oleh peneliti. Berikut hasil *coeficient reliability* pada setiap variabel yang telah di uji oleh kedua *coder*.

Tabel 3.12 Hasil Uji Realibilitas Setiap Indikator

No	Variabel	Dimensi	Indikator	CR (%)	Kesimpulan
1	Faktualitas	Kebenaran	Fakta	96	reliabel
2		Akurasi	Pencantuman Waktu	92	reliabel
			Atribusi	96	reliabel
3		Relevansi	Nilai Berita	100	reliabel
4	Imparsialitas	Keberimbangan	<i>Cover Both Sides</i>	56	tidak reliabel
5		Netralitas	Pencampuran Fakta dan Opini	84	reliabel
			Kesesuaian Judul dan Isi Berita	84	reliabel
			Dramatisasi	72	reliabel
	Kesesuaian Data Pendukung dan Isi Berita		100	reliabel	

3.6.1 Perhitungan Realibilitas Dimensi Kebenaran Indikator Fakta

Dalam indikator fakta, hasil *coding* dari media Detik.com dan Liputan6.com menunjukkan bahwa kedua *coder* meneliti 25 berita. Hasil uji reliabilitas untuk indikator fakta sebagai berikut:

Keterangan Kode:

- 1 : Mencantumkan Fakta Sosiologis Saja
- 2 : Mencantumkan Fakta Psikologis Saja
- 3 : Mencantumkan Kombinasi (Fakta Sosiologis dan Fakta Psikologis)

Tabel 3.13 Realibilitas Dimensi Kebenaran Indikator Fakta

No. Berita	Koder 1	Koder 2	Setuju (S) atau Tidak Setuju (TS)
2	3	3	S
44	2	3	TS
121	3	3	S
127	3	3	S
135	3	3	S
102	3	3	S
64	3	3	S
112	3	3	S
94	3	3	S
27	3	3	S
17	3	3	S
9	3	3	S
114	3	3	S
110	3	3	S
190	3	3	S
239	3	3	S
161	3	3	S
162	3	3	S
240	3	3	S

188	2	3	S
191	3	3	S
248	3	3	S
249	3	3	S
214	3	3	S
204	3	3	S
			Total S : 24 Total TS : 1

Hasil uji reliabilitas berdasarkan rumus R. Holsti adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{2 \times 24}{25 + 25} \times 100\% = 96\%$$

Hasil uji reliabilitas pada indikator fakta mencapai angka 96%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kebenaran dapat digunakan untuk menganalisis penelitian ini.

3.6.2 Perhitungan Realibilitas Dimensi Akurasi Indikator Pencantuman Waktu

Dalam indikator pencantuman waktu hasil *coding* dari media Detik.com dan Liputan6.com menunjukkan bahwa kedua *coder* meneliti 25 berita. Hasil uji reliabilitas untuk indikator pencantuman waktu sebagai berikut:

Keterangan Kode:

- 1 : Ada Pencantuman Waktu Terjadinya Peristiwa
- 2 : Tidak Ada Pencantuman Waktu Terjadinya Peristiwa

Tabel 3.14 Realibilitas Dimensi Akurasi Indikator Pencantuman Waktu

No. Berita	Koder 1	Koder 2	Setuju (S) atau Tidak Setuju (TS)
------------	---------	---------	-----------------------------------

2	1	1	S
44	2	1	TS
121	1	1	S
127	1	1	S
135	1	1	S
102	1	1	S
64	1	1	S
112	1	1	S
94	1	1	S
27	1	1	S
17	1	1	S
9	1	1	S
114	1	1	S
110	1	1	S
190	1	1	S
239	1	1	S
161	1	1	S
162	1	1	S
240	1	1	S
188	2	1	TS
191	1	1	S
248	1	1	S
249	1	1	S
214	1	1	S
204	1	1	S
			Total S : 23
			Total TS : 2

Hasil uji reliabilitas menggunakan rumus R. Holsti sebagai berikut:

$$CR = \frac{2 \times 23}{25 + 25} \times 100\% = 92\%$$

Hasil uji reliabilitas dalam indikator pencantuman waktu mencapai angka 92%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator pencantuman waktu dapat digunakan untuk menganalisis penelitian ini.

3.6.3 Perhitungan Realibilitas Dimensi Akurasi Indikator Atribusi

Dalam indikator atribusi, hasil *coding* dari media Detik.com dan Liputan6.com menunjukkan bahwa kedua *coder* meneliti 25 berita. Hasil uji reliabilitas untuk indikator atribusi sebagai berikut:

Keterangan Kode:

1 : Pencantuman Sumber Berita Jelas

2 : Pencantuman Sumber Berita Tidak Jelas

Tabel 3.15 Realibilitas Dimensi Akurasi Indikator Atribusi

No. Berita	Koder 1	Koder 2	Setuju (S) atau Tidak Setuju (TS)
2	1	1	S
44	2	1	TS
121	1	1	S
127	1	1	S
135	1	1	S
102	1	1	S
64	1	1	S
112	1	1	S
94	1	1	S
27	1	1	S
17	1	1	S
9	1	1	S
114	1	1	S
110	1	1	S
190	1	1	S
239	1	1	S
161	1	1	S
162	1	1	S
240	1	1	S
188	1	1	S
191	1	1	S
248	1	1	S
249	1	1	S
214	1	1	S
204	1	1	S
			Total S : 24 Total TS : 1

Hasil uji reliabilitas menggunakan rumus R. Holsti sebagai berikut:

$$CR = \frac{2 \times 24}{25 + 25} \times 100\% = 96\%$$

Hasil uji reliabilitas dalam indikator atribusi mencapai angka 96%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator atribusi dapat digunakan untuk menganalisis penelitian ini.

3.6.4 Perhitungan Realibilitas Dimensi Relevansi Indikator Nilai

Berita

Dalam indikator nilai berita atau *news value*, hasil *coding* dari media Detik.com dan Liputan6.com menunjukkan bahwa kedua *coder* meneliti 25 berita. Hasil uji reliabilitas untuk indikator relevansi berita atau *news value* sebagai berikut:

Keterangan Kode:

- 1 : Mengandung Nilai Berita
- 2 : Tidak Mengandung Nilai Berita

Tabel 3.16 Realibilitas Dimensi Relevansi Indikator Nilai Berita

No. Berita	Koder 1	Koder 2	Setuju (S) atau Tidak Setuju (TS)
2	1	1	S
44	1	1	S
121	1	1	S
127	1	1	S
135	1	1	S
102	1	1	S
64	1	1	S
112	1	1	S
94	1	1	S
27	1	1	S
17	1	1	S
9	1	1	S
114	1	1	S

110	1	1	S
190	1	1	S
239	1	1	S
161	1	1	S
162	1	1	S
240	1	1	S
188	1	1	S
191	1	1	S
248	1	1	S
249	1	1	S
214	1	1	S
204	1	1	S
			Total S : 25 Total TS : 0

Hasil uji reliabilitas menggunakan rumus R. Holsti sebagai berikut:

$$CR = \frac{2 \times 25}{25 + 25} \times 100\% = 100\%$$

Hasil uji reliabilitas dalam indikator relevansi mencapai angka maksimal yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator relevansi dapat digunakan untuk menganalisis penelitian ini.

3.6.5 Perhitungan Realibilitas Dimensi Keberimbangan Indikator

Cover Both Sides

Dalam indikator *cover both sides*, hasil *coding* dari media Detik.com dan Liputan6.com menunjukkan bahwa kedua *coder* meneliti 25 berita. Hasil uji reliabilitas untuk indikator *cover both sides* sebagai berikut:

Keterangan Kode:

1 : Mengandung *Cover Both Sides*

2 : Tidak Mengandung *Cover Both Sides*

Tabel 3.17 Realibilitas Dimensi Keberimbangan Indikator *Cover Both Sides*

No. Berita	Koder 1	Koder 2	Setuju (S) atau Tidak Setuju (TS)
2	1	2	TS
44	2	1	TS
121	1	1	S
127	1	1	S
135	1	2	TS
102	1	1	S
64	1	2	TS
112	1	1	S
94	1	2	TS
27	1	1	S
17	1	2	TS
9	1	1	S
114	1	1	S
110	1	1	S
190	1	2	TS
239	2	1	TS
161	1	1	S
162	1	2	TS
240	1	1	S
188	1	1	S
191	1	1	S
248	1	1	S
249	1	2	TS
214	1	2	TS
204	1	1	S
			Total S : 14 Total TS : 11

Hasil uji reliabilitas menggunakan rumus R. Holsti sebagai berikut:

$$CR = \frac{2 \times 14}{25 + 25} \times 100\% = 56\%$$

Hasil uji reliabilitas dalam indikator *cover both sides* adalah 56%, tidak mencapai angka batas minimum realibilitas 70%. Sehingga dalam

indikator *cover both sides* tidak dapat digunakan untuk menganalisis penelitian ini.

3.6.6 Perhitungan Realibilitas Dimensi Netralitas Indikator

Pencampuran Fakta dan Opini

Dalam indikator pencampuran fakta dan opini, hasil *coding* dari media Detik.com dan Liputan6.com menunjukkan bahwa kedua *coder* meneliti 25 berita. Hasil uji reliabilitas untuk indikator pencampuran fakta dan opini sebagai berikut:

Keterangan Kode:

1 : Ada Pencampuran Fakta dan Opini

2 : Tidak Ada Pencampuran Fakta dan Opini

Tabel 3.18 Realibilitas Dimensi Netralitas Indikator Pencampuran Fakta dan Opini

No. Berita	Koder 1	Koder 2	Setuju (S) atau Tidak Setuju (TS)
2	2	2	S
44	2	2	S
121	1	2	TS
127	1	2	TS
135	2	2	S
102	1	2	TS
64	2	2	S
112	2	2	S
94	2	2	S
27	2	2	S
17	2	2	S
9	1	2	TS
114	2	2	S
110	2	2	S
190	2	2	S
239	2	2	S
161	2	2	S
162	2	2	S

240	2	2	S
188	2	2	S
191	2	2	S
248	2	2	S
249	2	2	S
214	2	2	S
204	2	2	S
			Total S : 21
			Total TS : 4

Hasil uji reliabilitas menggunakan rumus R. Holsti sebagai berikut:

$$CR = \frac{2 \times 21}{25 + 25} \times 100\% = 84\%$$

Hasil uji reliabilitas dalam indikator pencampuran fakta dan opini mencapai angka 84%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator pencampuran fakta dan opini dapat digunakan untuk menganalisis penelitian ini.

3.6.7 Perhitungan Realibilitas Dimensi Netralitas Indikator

Kesesuaian Judul dan Isi

Dalam indikator kesesuaian judul dan isi, hasil *coding* dari media Detik.com dan Liputan6.com menunjukkan bahwa kedua *coder* meneliti 25 berita. Hasil uji reliabilitas untuk indikator kesesuaian judul dan isi sebagai berikut:

Keterangan Kode:

1 : Judul dan Isi Berita Sesuai

2 : Judul dan Isi Berita Tidak Sesuai

Tabel 3.19 Realibilitas Dimensi Netralitas Indikator Kesesuaian Judul dan Isi

No. Berita	Koder 1	Koder 2	Setuju (S) atau Tidak Setuju (TS)
2	1	1	S
44	1	1	S
121	1	1	S
127	1	1	S
135	1	1	S
102	1	1	S
64	1	1	S
112	1	1	S
94	1	1	S
27	1	1	S
17	1	1	S
9	1	1	S
114	2	1	TS
110	1	1	S
190	1	2	TS
239	1	1	S
161	1	1	S
162	1	1	S
240	1	1	S
188	1	1	S
191	1	1	S
248	1	1	S
249	1	1	S
214	1	2	TS
204	1	2	TS
			Total S : 21 Total TS : 4

Hasil uji reliabilitas menggunakan rumus R. Holsti sebagai berikut:

$$CR = \frac{2 \times 21}{25 + 25} \times 100\% = 84\%$$

Hasil uji reliabilitas dalam indikator kesesuaian judul dan isi mencapai angka 84%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kesesuaian judul dan isi dapat digunakan untuk menganalisis penelitian ini.

3.6.8 Perhitungan Realibilitas Dimensi Netralitas Indikator

Dramatisasi

Dalam indikator dramatisasi, hasil *coding* dari media Detik.com dan Liputan6.com menunjukkan bahwa kedua *coder* meneliti 25 berita.

Hasil uji reliabilitas untuk indikator dramatisasi sebagai berikut:

Keterangan Kode:

1 : Mengandung Dramatisasi

2 : Tidak Mengandung Dramatisasi

Tabel 3.20 Realibilitas Dimensi Netralitas Indikator Dramatisasi

No. Berita	Koder 1	Koder 2	Setuju (S) atau Tidak Setuju (TS)
2	1	2	TS
44	1	2	TS
121	2	2	S
127	2	2	S
135	2	2	S
102	2	2	S
64	2	2	S
112	2	2	S
94	1	2	TS
27	1	2	TS
17	2	2	S
9	1	2	TS
114	2	2	S
110	2	2	S
190	1	1	S
239	2	2	S
161	2	2	S
162	2	2	S
240	1	2	TS
188	2	2	S
191	1	2	TS
248	2	2	S
249	1	1	S
214	1	1	S
204	1	1	S
			Total S : 18 Total TS : 7

Hasil uji reliabilitas menggunakan rumus R. Holsti sebagai berikut:

$$CR = \frac{2 \times 18}{25 + 25} \times 100\% = 72\%$$

Hasil uji reliabilitas dalam indikator dramatisasi mencapai angka 72%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator dramatisasi dapat digunakan untuk menganalisis penelitian ini.

3.6.9 Perhitungan Realibilitas Dimensi Netralitas Indikator

Kesesuaian Data Pendukung dengan Isi

Dalam indikator kesesuaian data pendukung dan isi, hasil *coding* dari media Detik.com dan Liputan6.com menunjukkan bahwa kedua *coder* meneliti 25 berita. Hasil uji reliabilitas untuk indikator kesesuaian data pendukung dan isi sebagai berikut:

Keterangan Kode:

- 1 : Data Pendukung dan Isi Sesuai
- 2 : Data Pendukung dan Isi Tidak Sesuai

Tabel 3.21 Realibilitas Dimensi Netralitas Indikator Kesesuaian Data Pendukung dengan Isi

No.Berita	Koder 1	Koder 2	Setuju (S) atau Tidak Setuju (TS)
2	1	1	S
44	1	1	S
121	1	1	S
127	1	1	S
135	1	1	S
102	1	1	S
64	1	1	S
112	1	1	S

94	1	1	S
27	1	1	S
17	1	1	S
9	1	1	S
114	1	1	S
110	1	1	S
190	1	1	S
239	1	1	S
161	1	1	S
162	1	1	S
240	1	1	S
188	1	1	S
191	1	1	S
248	1	1	S
249	1	1	S
214	1	1	S
204	1	1	S
			Total S : 25
			Total TS : 0

Hasil uji reliabilitas menggunakan rumus R. Holsti sebagai berikut:

$$CR = \frac{2 \times 25}{25 + 25} \times 100\% = 100\%$$

Hasil uji reliabilitas dalam indikator kesesuaian data pendukung dan isi mencapai angka maksimal yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kesesuaian data pendukung dan isi dapat digunakan untuk menganalisis penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data berdasarkan kategori objektivitas menurut Westerstahl. Objektivitas Westerstahl secara garis besar terbagi menjadi dua konsep yaitu faktualitas dan

imparsialitas. Analisis data dilakukan setelah peneliti mendapatkan semua data berupa artikel berita yang diperlukan. Teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami.

Selain itu, analisis data berguna untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Data tersebut didapatkan dari *coding sheet* yang telah diisi oleh *coder*, kemudian dimasukkan ke dalam tabel sesuai dengan kategorinya. Setelah mendapatkan hasil, akan dilakukan analisis deskriptif bagi setiap indikator. Untuk melakukan pengolahan data, program yang digunakan peneliti adalah SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) versi 23 MAC OSX. Menurut Ghozali (2005, h.15), program ini merupakan salah satu *software* yang berguna untuk melakukan analisis data melalui perhitungan statistik.

Dalam analisis data yakni artikel berita mengenai isu korupsi e-KTP di Detik.com dan Liputan6.com akan menggunakan teknik statistik deskriptif untuk membantu. Teknik tersebut berguna untuk menyederhanakan data hasil penelitian sehingga mudah dipahami. Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul (Sugiyono, 2012, h. 148).